

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Sebuah kebijakan perdagangan yang ada pada suatu negara akan memengaruhi kegiatan perdagangan dengan negara lain. Dengan kebijakan perdagangan yang terdapat di suatu negara memiliki regulasi mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi negara lain. Salah satunya ketentuan mengenai standar teknis. Ketentuan mengenai standar teknis salah satunya berkaitan dengan persyaratan Sanitary dan Phytosanitary (SPS). Ketentuan mengenai SPS diberlakukan suatu negara untuk melindungi tanaman, binatang dan kesehatan manusia berdasarkan prinsip ilmu pengetahuan. Ketentuan yang terdapat didalam SPS berkaitan dengan kebijakan perdagangan di suatu negara mengenai keamanan pangan. Produk-produk pertanian terdiri dari tanaman dan binatang yang biasanya mengandung bahan-bahan kimia pada pertanian yang digunakan suatu negara. Oleh karena itu, untuk melindungi kesehatan masyarakat, sebuah negara menerapkan suatu kebijakan keamanan pangan.

Salah satu negara yang menerapkan kebijakan keamanan pangan adalah Jepang. Jepang memang dikenal sebagai negara yang ketat dalam masalah keamanan makan dan minuman yang masuk ke negaranya, begitupun pada produk-produk pertanian yang berpotensi kandungan bahan kimia *agrochemical* berbahaya bagi kesehatan. Di Jepang, terdapat suatu kebijakan mengenai keamanan pangan. Kebijakan tersebut bernama kebijakan *Maximum Residue Limits* (MRLs). Kebijakan MRLs diterapkan oleh pemerintah Jepang dengan tujuan melindungi produk-produk yang masuk ke negaranya dari kontaminasi bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan.

Dalam kebijakan MRLs di Jepang, terdapat bahan-bahan yang ditetapkan standar maksimum residu nya (MRL). Ketentuan itu terdapat dalam *positive list system* pada kebijakan MRLs. Bahan-bahan kimia yang ditetapkan MRL-nya dalam *positive list system*, meliputi pestisida, fungisida, herbisida dan bahan-bahan kimia lain yang terdapat pada produk pertanian.

Kopi merupakan salah satu produk pertanian khususnya dalam produk perkebunan. Di Jepang, kopi termasuk dalam bahan-bahan yang ditetapkan MRL-nya. Terdapat 140 bahan-bahan kimia pada kopi khususnya biji kopi yang diatur atau ditetapkan MRL-nya. Dalam kebijakan MRLs di Jepang, untuk bahan-bahan kimia *agrochemical* yang belum di uji secara ilmiah dan belum ditetapkan MRL-nya, maka Jepang menetapkan standar MRL-nya sebesar 0,01 ppm.

Jepang terkenal sebagai negara yang banyak mengkonsumsi teh, khususnya teh hijau. Namun, dengan adanya globalisasi Jepang juga mengkonsumsi kopi. Bahkan, konsumsi di Jepang semakin meningkat. Dengan meningkatnya konsumsi kopi di Jepang, Jepang membutuhkan impor kopi dari negara-negara produsen dunia. Jepang lebih banyak mengimpor biji kopi dalam kegiatan impor kopinya. Hal itu disebabkan karena banyaknya kedai-kedai minum kopi di Jepang, sehingga biji kopi tersebut diolah menjadi produk minuman kopi sendiri.

Indonesia sebagai salah satu negara produsen kopi dunia juga sebagai salah satu negara yang mengekspor kopi ke Jepang. Jepang menjadi salah satu negara tujuan ekspor utama kopi Indonesia. Dengan meningkatnya konsumsi kopi di Jepang, hal itu menjadi peluang bagi Indonesia untuk meluaskan pasar kopinya ke Jepang. Produk kopi Indonesia yang lebih banyak di ekspor kopi ke Jepang yaitu dalam bentuk biji kopi mentah. Biji kopi termasuk dalam bahan-bahan yang ditetapkan MRL-nya dalam *positive list system* pada kebijakan MRLs di Jepang.

Dalam kegiatannya, ekspor kopi Indonesia sempat mengalami hambatan ke Jepang. Hambatan tersebut disebabkan karena kebijakan MRLs di Jepang, dimana terdapat bahan kimia pestisida pada kopi Indonesia yang melebihi standar di Jepang. Pada tahun 2009, Jepang menetapkan standar MRL pada bahan kimia pestisida *carbaryl* untuk biji kopi sebesar 0,01 ppm. Ketetapan standar MRL di Jepang itu berbeda dengan standar universal di negara tujuan ekspor kopi dunia lainnya seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Di Uni Eropa ketetapan standar MRL pada pestisida *carbaryl* untuk biji kopi sebesar 0,1 ppm, sementara di Amerika Serikat sebesar 0,3 ppm. Sehingga, di tahun yang sama, terdapat laporan bahwa ekspor kopi Indonesia ke Jepang khususnya biji kopi robusta Indonesia terindikasi mengandung residu pestisida *carbaryl* melebihi standar di Jepang. Hal itu menyebabkan terhambatnya ekspor kopi Indonesia ke Jepang.

Dengan terindikasinya ekspor kopi Indonesia khususnya biji kopi robusta ke Jepang melebihi standar ketentuan di Jepang, kegiatan ekspor kopi Indonesia mengalami hambatan. Salah satu dampaknya, kopi Indonesia dikenakan wajib pemeriksaan oleh Jepang. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kandungan pestisida yang terkandung pada kopi Indonesia. Akibatnya eksportir Indonesia mengalami kerugian karena biaya untuk pemeriksaan tersebut tinggi dan harus ditanggung oleh eksportir itu sendiri. Bahkan eksportir Indonesia sempat menahan mengirim ekspor kopi ke Jepang karena belum tentu kopi bisa masuk ke Jepang. Dampak lain yang ditimbulkan yaitu terjadinya penurunan volume ekspor kopi Indonesia ke Jepang pada tahun 2010-2012.

Dengan adanya beberapa dampak yang timbul akibat hambatan tersebut, Indonesia melakukan upaya diplomasi dengan Jepang. Upaya tersebut dilakukan agar Jepang mau merevisi standar MRL untuk biji kopi nya. Indonesia meminta Jepang merevisi standar ketetapan MRL untuk biji kopi nya seperti standar yang ditetapkan Uni Eropa yaitu dari 0,01 ppm menjadi 0,1 ppm.

Beberapa upaya diplomasi Indonesia dengan Jepang yang dilakukan Indonesia diantaranya yaitu:

- a. Pertama, diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Jepang. Pada proses diplomasi ini, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Indonesia diantaranya upaya monitoring dan pengujian kandungan pestisida *carbaryl* pada kopi Indonesia, upaya klarifikasi dan permohonan kebijakan, perundingan Bilateral Antara Indonesia Dengan Jepang, dan dialog intensif Indonesia dengan Jepang. Dialog Intensif tersebut terjadi pada suatu pertemuan yang dilakukan pada suatu acara yang diselenggarakan di Jepang. Indonesia menghadiri acara tersebut dan diselingi dengan upaya dialog intensif oleh Indonesia terhadap Jepang terkait masalah residu pestisida *carbaryl*. Beberapa upaya tersebut merupakan upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Jepang untuk menyelesaikan masalah residu pestisida khususnya *carbaryl* pada kopi Indonesia.
- b. Kedua, diplomasi dalam sidang forum, dimana terdapat pembahasan dalam dua sidang yang diikuti oleh Indonesia yaitu Sidang Di *Trade*

Policy Review Body (TPRB) dan *International Coffee Organization* (ICO). Dalam pertemuan pada kedua sidang tersebut, bukan dilakukan sebagai suatu proses penyelesaian masalah. Tetapi, pembahasan dalam sidang dimaksudkan sebagai pembahasan mengenai isu yang dibahas oleh Indonesia. Hal itu sebagai upaya pendukung untuk mencari penjelasan atau pembahasan mengenai isu terkait dalam sidang tersebut.

Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Jepang tersebut, juga tidak selalu berjalan dengan baik. Karena masih terdapat beberapa hambatan yang dilalui seperti diantaranya tidak ada tanggapan serius dari pihak Jepang serta dibutuhkan nya beberapa bukti berupa data yang harus dimiliki Indonesia sebagai syarat untuk merevisi standar MRL pestisida *carbarayl* pada biji kopi di Jepang. Setelah melalui proses yang cukup panjang, dari beberapa upaya diplomasi serta upaya pendukung diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Jepang akhirnya membuahkan hasil yang baik untuk Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan Indonesia, Jepang akhirnya mengeluarkan perintah pencabutan pemeriksaan wajib terhadap kopi Indonesia. Hal itu berlaku sejak tanggal 30 Mei 2013, dari hasil tersebut disebutkan bahwa tidak ada kewajiban pemeriksaan residu pestisida *carbaryl* untuk kopi Indonesia yang masuk ke Jepang. Jepang menyampaikan bahwa pemeriksaan untuk kopi Indonesia yang awalnya 100% beralih menjadi 30%. Sehingga, pemeriksaan akan dilakukan secara acak/random terhadap 30% biji kopi Indonesia selama beberapa periode.

IV.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah kebijakan *Maximum Residues Limits* (MRLs) di Jepang sebagai suatu kebijakan keamanan pangan untuk melindungi masyarakatnya dari bahan-bahan kimia pada produk pertanian yang berbahaya bagi kesehatan cukup baik. Mengingat, saat ini banyak produk-produk pertanian yang mengandung bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, setiap negara wajib melindungi masyarakatnya dari produk-produk berbahaya yang dapat merugikan seperti halnya Jepang.

Namun, dalam menentukan standar ketetapan mengenai kandungan bahan-bahan kimia yang ditetapkan batas nya seperti dalam *positive list system* pada kebijakan MRLs di Jepang harus mempertimbangkan standar universal atau standar yang sama di negara lain. Ketetapan standar juga lebih baik mengikuti standar universal agar terjadinya suatu keharmonisan. Sehingga, negara lain dapat mengetahui standar yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya masalah.

